

**ANALISIS YURIDIS PERWALIAN ANAK
KARENA PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA
YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
(STUDI PUTUSAN NO.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn)**

HASIANI PUTRINTA DONGORAN

ABSTRACT

There fore minors are at the mercy of parents, but parental authority can be revoked by the religious court this is due to negligence and no ready parents in taking care of their children, Issues of revocation of power of parents by the court is very interesting to study in a thesis, with the background of problems as follows, namely how the legal position of its parents are not known to exist, and what form of legal protection of children as a result of the revocation of parents set religious court, and how due to child-custody laws for the revocation of parents who are not known to exist (Study Of Religion Court Decision Number 1613 / PDT.G / 2014 / PA.Mdn). While legal protection against children forms due to the revocation power of parents who set namely religious courts religious Courts assign a guardian as Substitute notch the father and mather parents to review nurture and take care of the interests of the young everything. in addition to legal consequences the against child trust because revocation power of parents who is not known to exist (Study Of Religion Court Decision Number 1613 / Pdt.G / 2014 / PA.Mdn) That trustee appointed and by the religious court decided to replace the position differences parent power against his son the has repealed by justice religion because known to exist.

Keywords : Child Custody, Parents', Revocation Of Parents' Authority

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban Orang Tua ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut

kemampuannya, yaitu memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu perkawinan.

Seorang anak yang lahir didunia ini serta merta membutuhkan kepada orang lain yang akan memeliharanya, baik dirinya maupun harta bendanya, hak miliknya, karena ia membutuhkan orang lain yang akan menguasai penyusuan dan pengasuhannya. Demikian juga membutuhkan orang lain yang menjaga dan memeliharanya, serta mendidik dan mengajarnya, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniyah dan pembentukan kepribadiannya, dan juga membutuhkan orang yang akan mengawasi urusan hak miliknya, agar supaya dipelihara dan diperkembangkan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama. Pengertian Kekuasaan Orang Tua yaitu Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.¹ Namun kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut oleh pengadilan hal ini dikarenakan kelalaian dan kealpaan orang tuanya dalam mengurus anaknya, salah satunya meninggalkan dan menelantarkan anaknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.² Dan di dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam perwalian hanya terdapat pada anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.³

Pada Prinsipnya seorang wali dengan kewenangannya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang berada dibawah perwaliannya. Wali juga harus dari keluarga terdekat karena persoalan pribadi dan

¹ Zakarya Ahmad Al-barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta, Penerbit: Bulan Bintang, 1977, Hal. 106

² Lihat Pasal 50, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Lihat Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam

harta merupakan persoalan yang cukup rumit.⁴ Pemilihan Wali yang masih mempunyai hubungan ini dilakukan mengingat wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan orang tua yang meliputi juga penguasaan harta terhadap si anak. Diharapkan jika wali masih mempunyai hubungan keluarga maka kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penyelewengan pemakaian harta untuk keperluan pribadi oleh wali tidak akan terjadi.⁵

II. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Normatif (Hukum Normatif), yang merupakan penelitian kepustakaan, yakni penelitian terhadap data sekunder, dengan maksud untuk mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.⁶ Spesifikasi penelitian dalam penulisan bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan “Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*),⁷ yang memfokuskan pengumpulan semua Perundang-Undangan yang terkait dengan Perwalian, kemudian menganalisa baik tertulis didalam buku, melakukan pengkajian peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia maupun hukum yang diputuskan melalui Proses Pengadilan, dan khusus dalam penulisan tesis ini yaitu menelaah kasus yang terjadi berdasarkan putusan Pengadilan Agama No.1613/PDT.G/2014/PA.Mdn.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menghimpun data-data dengan melakukan penelaahan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai penelitian Hukum Normatif, penelitian ini menitikberatkan pada data studi kepustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum *Primer*, yaitu berupa Undang-Undang dan Peraturan-

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Penerbit: Rajawali Press, 2004, Hal. 135

⁵ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Bandung, Penerbit: Alumni, 1978, Hal. 45

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Penerbit: Ghalia Indonesia, 1998, Hal. 11

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit: Prenada Media, 2009, Hal. 102

Peraturan yang terkait dengan objek penelitian, yang diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kearifan Lokal (Hukum Adat dan Hukum Islam), dan Kebijakan serta peraturan yang dibuat Aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu juga dengan Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, dan Bahan Hukum *Tersier*, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Jurnal Hukum, Jurnal Ilmiah, Surat Kabar, Internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode yang digunakan ketika data masih bersifat khusus yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan bersifat umum.⁹

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekuasaan orang tua terhadap anak didasarkan pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memberikan kewajiban bagi orang tua dalam menjalankan kekuasaannya untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban tersebut tidak akan berakhir oleh putusanya perkawinan oleh kedua orang tua dan akan terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri.¹⁰ Selanjutnya berdasarkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua mewakili kepentingan anak mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, dimana

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers, 1990, Hal. 14

⁹ Saifuddin azwar. *Metode Penelitian*. cet. ke-5, Yogyakarta, penerbit: Pustaka Pelajar. 2004, Hal. 5

¹⁰ Lihat Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawin

kekuasaan tersebut akan terus berlangsung sampai si-anak berusia 18 Tahun atau telah dewasa. Kewajiban ini akan terus berlangsung sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri dan tidak akan berhenti meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus karena perceraian.¹¹

Kekuasaan orang tua terhadap anak pada dasarnya akan terus berlangsung berdasarkan dua prinsip utama. Pertama, kekuasaan orang tua berlaku sampai anak menjadi dewasa. Kedua, kekuasaan orang tua berlaku sepanjang tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan. Adanya perceraian tidak akan menghilangkan kekuasaan orang tua terhadap anak. Pemahaman terhadap pengertian dewasa adalah batas usia 21 tahun. Namun demikian, karena usia 18 tahun bagi pria dan usia 15 tahun bagi wanita sudah diperbolehkan kawin, maka anak yang telah kawin dianggap sebagai telah dewasa. Artinya, meskipun anak belum genap berusia 21 tahun namun telah melangsungkan perkawinan dianggap dewasa. Demikian pula sekiranya terjadi perceraian dalam perkawinan anak sebelum usia 21 tahun, tidak dapat mengembalikan status anak sebagai belum dewasa.¹²

Dalam konteks fiqih dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalunya, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya. Akan tetapi seandainya kedua orang tua terpaksa berpisah (bercerai), maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara baik dan yang buruk, kira-kira di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Dan jika si anak sudah di anggap *mumayyiz*, ia dipersilahkan memilih antara ikut dengan ibu ataupun ayahnya.¹³

Mengenai hak anak dalam mendapatkan kepemilikan harta dari orang tua ditegaskan pada Pasal 106 Ayat (1): Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan,

¹¹ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-17, Jakarta, Penerbit: Intermasa, 1983, Hal. 37-41

¹³ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktisi II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para ulama*, Bandung, Penerbit: Karisma, 2008, Hal. 23

dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengendalikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dan Ayat (2) menegaskan: Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian. Pada Ayat (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya.¹⁴

A. Kedudukan Hukum Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya

Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya.¹⁵ Dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 Ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.¹⁶

Sejumlah ayat Al-Qur'an secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Hak Anak untuk Hidup
- 2) Hak Anak dalam Kejelasan Nasabnya
- 3) Hak Anak dalam Pemberian Nama yang Baik
- 4) Hak Anak dalam memperoleh Air Susu Ibu (ASI)
- 5) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- 6) Hak Anak dalam Kepemilikan Harta Benda
- 7) Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Syarat-syarat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua:

1. Permintaannya harus diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga terdekat atau lembaga negara;
2. Pencabutan hanya dalam hal-hal tertentu yaitu :

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (menurut: perundangan hukum adat hukum Islam)*, Bandung, Penerbit: Mandar Maju, 2003, Hal. 53

¹⁵ Lihat Pasal 47, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ Lihat Pasal 98, Ayat (1), Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

- penyalagunaan kekuasaan ortu;
- sangat mengabaikan kewajiban untuk pemberian pendidikan dan pemeliharaan;
- tingkah laku yang buruk (tergantung hakim yang menentukan batas-batasnya);
- dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak itu;
- dijatuhi hukuman karena sebuah kejahatan terhadap asas usul anak, kesusilaan, meninggalkan orang yang perlu ditolong, kemerdekaan orang tua, nyawa, penganiayaan.
- Dijatuhi hukuman badan lebih dari dua tahun lamanya.¹⁷

Akibat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yaitu pada dasarnya dapat dinyatakan, bahwa dengan pencabutan orang tua dari salah seorang orang tua, maka kekuasaan orang tua itu tidak berakhir, akan tetapi demi hukum (*Van Rechtswege*) dilakukan oleh orang tua yang lain, jikalau orang tua yang lain itu tidak kehilangan kekuasaan orang tuanya (dicabut atau dibebaskan). Konkretnya, jika kekuasaan orang tua atas seorang ayah dicabut maka yang menjalankan kekuasaan orang tua adalah ibu, dengan ketentuan bahwa ayah dan anak yang bersangkutan itu harus berada dalam satu rumah. Kewajiban Orang Tua yang dicabut Kekuasaan Orang Tuanya dalam Hubungan dengan Pemberian dan Penghidupan kepada Anaknya, yaitu Orang tua masih tetap wajib memberikan bantuannya dalam hal pemberian nafkah dan pemberian kehidupan kepada anak-anaknya, walaupun kekuasaan orang tuannya telah dicabut. Pemberian itu harus diberikan setiap minggu atau setiap bulan atau setiap tiga bulan kepada Wali yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pengadilan, dengan sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pengadilan Agama. Pengembalian Kekuasaan Orang Tua dapat dilakukan dengan meminta pengembalian kekuasaan orang tua tersebut melalui Pengadilan Agama. Pencabutan kekuasaan orang tua mengakibatkan hilangnya hak penikmatan hasil dan kuasa dan kuasa asuh terhadap anak.

¹⁷ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit: Rineka Cipta, 2000, Hal. 78

Seorang ayah atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua dapat dibebaskan oleh hakim dari kekuasaannya itu. Syarat-syarat untuk pembebasan ini adalah:

1. Ketidaccakapan atau ketidakmampuan untuk menunaikan kewajibannya akan memelihara dan mendidik anak-anaknya. Misalnya: seorang ayah yang tidak dapat mengendalikan anaknya yang nakal, berarti dia tidak cakap dan sekaligus tak mampu untuk mendidik anak itu.
2. Kepentingan anak-anak karena hal-hal lain tidak bertentangan dengan pembebasan itu. Tindakan pembebasan diadakan untuk kepentingan si anak. Oleh karena itu si ayah atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak boleh dibebaskan dari kekuasaan itu, apabila kepentingan si anak bertentangan dengan pembebasan itu.
3. Si ayah atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak mengajukan perlawanan. Si ayah atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak boleh dibebaskan dari kekuasaan itu, jika ia mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu. Perlu diingat bahwasanya orang gila harus dianggap tidak mampu untuk mengutarakan kehendaknya dan demikian tak mungkin mengajukan perlawanan atau keberatan. Orang gila tidak cakap dan tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan demikian ia boleh dibebaskan dari kekuasaan tersebut.¹⁸

Kedudukan hukum kekuasaan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya yaitu Pengadilan Agama dapat menetapkan mencabut kekuasaan orang tua si anak yang tidak diketahui keberadaannya dan menunjuk seorang wali yang berdasarkan garis keturunan lurus keatas atau saudara kandung dan keluarga orang tua sianak atas permohonan kerabatnya tersebut.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Ditetapkan Pengadilan Agama

¹⁸ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Semarang, Penerbit: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981, Hal. 470-471

Pengadilan Agama di Indonesia dalam memutuskan perkara pengasuhan anak atau penetapan perwalian tidak hanya berdasarkan asas hukum islam saja, tetapi menggunakan asas hukum yang lainnya yang tidak bertentangan dengan aqidah ajaran islam, dan asas hukum lainnya tersebut harus bisa memberikan jaminan perlindungan atau dapat memenuhi hak-hak anak. Dan pertimbangan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara mengenai pengasuhan dan/atau perwalian terhadap anak yaitu berlandaskan ketentuan fiqih islam yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijabarkan dalam peraturan yang berkekuatan hukum seperti Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bisa dijadikan landasan bagi hakim dalam memutuskan perkara pemngasuhan anak atau penetapan perwalian anak di Pengadilan Agama, karena ketentuan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.¹⁹

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu, orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Setiap anak yang belum dewasa, mempunyai hak untuk dipelihara secara baik. Mereka memerlukan pengawasan, penjagaan, bimbingan, arahan serta pendidikan dari Orang tua atau pihak lain apabila orang tua sudah tidak ada lagi dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak korban perlakuan salah dan penelantaran berhak atas perlindungan khusus. Oleh karena itu anak korban perceraian termasuk anak bermasalah harus mendapat perlindungan khusus.²⁰

Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

¹⁹ Makalah Ilmiah oleh Ikatan Pendidikan Luar Sekolah Se-Indonesia, Pemahaman *Hak Asuh Anak dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak Di Pengadilan*, Arsip PLSUM, 2016

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (15) -undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.²¹

Dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa Salah satu orang tua, saudara kandung, atau sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

Dalam memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak” sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, Karena tiadanya aturan yang jelas maka pada umumnya, secara baku, hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi non materi. Singkat kata, diletakkan pada kebijakan hakim dan sejauh mana hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.²²

Bentuk perlindungan hukum Terhadap anak akibat pencabutan kekuasaan orang tua yang ditetapkan Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama menetapkan wali sebagai pengganti kedudukan orang tuanya untuk mengasuh dan mengurus segala kepentingan si-anak. Wali bertanggung jawab penuh terhadap segala kebutuhan untuk perkembangan kehidupan anak-anak yang berada dibawah perwaliannya baik berupa kebutuhan sandang dan pangan serta pendidikannya. Dan harta yang miliki si-anak berada dalam pengawasan dan kekuasaan seorang wali, namun tidak dapat menggunakannya selain untuk kepentingan anak tersebut, dan seorang wali bertanggung jawab atas segala kerugian harta si anak yang berada dalam kekuasaanya.

C. Akibat Hukum Terhadap Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan Pengadilan Agama No.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn)

²¹ Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²² Makalah Ilmiah oleh Ikatan Pendidikan Luar Sekolah Se-Indonesia, Pemahaman *Hak Asuh Anak dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak Di Pengadilan*, Arsip PLSUM, 2016

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur kehidupan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.²³ Dalam kompilasi Hukum Islam disebut batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Dan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga diatur mengenai anak yang tidak berada pada kekuasaan orang tuanya, atau orang tua lalai dari tanggung jawabnya. Aturan ini terdapat dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

“Ayat (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Ayat (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”²⁵

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

²³ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁴ Lihat Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Ayat (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”²⁶

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam aturan ketentuan hukum perwalian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dalam Undang-Undang tersebut di jelaskan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Selain itu wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan juga wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.²⁷

Seorang wali juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dibawa perwaliannya dan ia berkelakuan buruk sekali. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut apabila menyalahgunakan wewenangnya sebaga wali dan/atau melalaikan kewajibannya terhadap anak dibawa perwaliannyanya dan ia berkelakuan buruk. Dan Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan

²⁶ Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁷ Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.²⁸

Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum *akil baliqh* dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap sianak”.²⁹ Menurut Hukum Indonesia, “Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua”.³⁰

Tujuan Perwalian terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

1. Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada dibawah Perwalian-nya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum.
2. Wali bertindak sebagai pengayom, dalam arti bahwa wali itu selalu menjaga, baik itu menjaga harta maupun jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menggunakan hartanya dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan juga dari hal hal yang membahayakan jiwanya atas orang yang berada dibawah Perwalian-nya itu.
3. Adanya wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya, apabila orang tersebut sudah meninggal dunia.maka dengan adanya wali tersebut anak dan hartanya akan terselamatkan.
4. Menambah hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang-orang yang mengadakan *wala' al mu'awallah* Perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan.
5. Menciptakan lapangan kerja dalam hal wali anak yatim, dengan adanya wali yatim tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi para wali yang miskin. dengan demikian maka para wali yatim itu tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari, hal ini diperbolehkan jika ia terhalang berusaha yang lain karena mengurus harta anak yatim tersebut yang dipeliharanya itu sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

²⁸ Lihat Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁹ Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet,2, Jakarta,Penerbit: Fakultas Hukum Indonesia, 2004, Hal 147

“Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin maka bolehlah ia memakan itu menurut yang patut” (An-Nisa : 6)”.³¹

Hak Perwalian anak akan ditetapkan hakim terhadap seseorang yang di nilai mampu menjadi seorang wali yang baik, tentu saja di dalam menetapkan seseorang wali, hakim akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Sehingga diharapkan hak Perwalian anak tidak jatuh ke tangan yang salah dan diharapkan orang yang akan menjadi wali dapat menjamin kebutuhan dari anak tersebut, seperti sandang, pangan, dan papan.

Pada Umumnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum Islam diatur adalah ibu yang memelihara anaknya ketika bercerai dan jika ibu sudah tidak ada, diserahkan kepada pemelihara yang lebih dekat dengan urutan sebagai berikut:

- a. Ibunya ibu (nenek dari ibu)
- b. Ibunya ayah (nenek dari ayah)
- c. Ibunya nenek
- d. Seterusnya dengan mendahulukan perempuan baru laki-laki (kalau sudah tidak ada yang perempuan) seperti bibi.³²

Menurut Hukum Islam orang yang berhak ditunjuk menjadi wali terdiri dari:

- a. Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris, yaitu siapa yang berhak mendapat warisan terlebih dahulu.
- b. Jika anak tersebut belum dapat memilih, para ahli fiqih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayah dan urutannya sebagai berikut:
 - a) Nenek dari pihak ibu
 - b) Kakek dari pihak ibu
 - c) Saudara perempuan sekandung dari anak tersebut

³¹ H Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, Cet 34*, Bandung, Penerbit: Sinar Baru Algesindo, 2001, Hal. 1317

³² Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Penerbit: PT Raja Grafindo, 1997, Hal. 72

- d) Saudara perempuan se ibu
- e) Saudara perempuan se ayah
- f) Kemenakan perempuan sekandung
- g) Kemenakan perempuan ibu se ibu
- h) Saudara perempuan ibu sekandung
- i) Saudara perempuan ibu se ibu
- j) Saudara perempuan ibu se ayah
- k) Kemenakan perempuan ibu se ayah
- l) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
- m) Anak perempuan saudara laki-laki se ibu
- n) Anak perempuan saudara laki-laki se ayah
- o) Bibi dari ibu sekandung
- p) Bibi dari ibu se ibu
- q) Bibi dari ibu se ayah

Tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah Perwalian-nya untuk kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya perincian tugas dan kewajiban seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah Perwalian-nya dijelaskan dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di Bawah Perwalian-nya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah Perwalian-nya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah Perwalian-nya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah Perwalian-nya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah Perwalian-nya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut Ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Dalam Pasal 111 Ayat (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berda di bawah Perwalian-nya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Adapun tugas dan kewajiban seorang wali terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1)-(5) di rinci sebagai berikut:

- a. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta benda yang sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah Perwalian-nya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya
- d. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali jika kepentingan anak mengharuskannya.³³

Menyangkut dengan mulai berlaku suatu Perwalian Martiman Prodjohamidjojo mengatakan sutau perwalian itu berlaku:

1. Sejak Perwalian itu diangkat oleh Hakim dan bila pengangkatan itu dilakukan namun dalam tidak kehadiran si wali maka saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya maka berlangsung lah Perwalian tersebut;
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua sianak pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya, memperoleh suatu kekuatan untuk berlaku dan yang dianggap sebagai wali menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu;
3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat sebagai wali, baik oleh Hakim Maupun oleh salah satu orang tua dari kedua orang tuanya pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari Hakim menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan itu;

³³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan Indonesia*, Bandung, Penerbit: PT Remaja Rosdakarya, 1991, Hal. 144-145.

4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amal atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
5. Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadi peristiwa yang mengakibatkan Perwalian-nya;
6. Jika ditunjuk oleh seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau pesan yang dilakukan dihadapan dua orang saksi (Pasal 50, 52 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).³⁴

Pada umumnya dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diambil kesimpulan bahwa perwalian dapat berakhir dalam hal-hal berikut ini:

1. Anak dibawah Perwalian telah dewasa
2. Anak meninggal dunia
3. Wali meninggal dunia
4. Wali dipecat dari Perwalian

Akibat hukum terhadap perwalian anak karena pencabutan kekuasaan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya (Studi Putusan Pengadilan Agama NO.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn) yaitu wali yang ditunjuk dan diputuskan oleh Pengadilan Agama menggantikan kedudukan orang tua atas kekuasaan terhadap anaknya yang telah dicabut oleh Pengadilan Agama karena tidak diketahui keberadaannya, dan wali tersebut berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, dan masa perwalian tersebut berlangsung sampai anak tersebut beranjak dewasa atau sudah kawin serta sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan orang tua kandung dari si anak yang dicabut kekuasaan asuh terhadap anaknya tidak bisa lagi memperoleh hak asuhnya kembali karena ia telah melalikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dan itu adalah suatu merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan Unadang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Penerbit: Indonesia Legal Center Publishing, 2002, Hal 57

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum kekuasaan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya yaitu Pengadilan Agama dapat menetapkan mencabut kekuasaan orang tua si anak yang tidak diketahui keberadaannya dan menunjuk seorang wali yang berdasarkan garis keturunan lurus keatas atau saudara kandung dan keluarga orang tua si-anak atas permohonan kerabatnya tersebut.
2. Bentuk perlindungan hukum Terhadap anak akibat pencabutan kekuasaan orang tua yang ditetapkan Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama menetapkan wali sebagai pengganti kedudukan orang tuanya untuk mengasuh dan mengurus segala kepentingan si-anak. Wali bertanggung jawab penuh terhadap segala kebutuhan untuk perkembangan kehidupan anak-anak yang berada dibawah perwaliannya baik berupa kebutuhan sandang dan pangan serta pendidikannya. Dan harta yang miliki si-anak berada dalam pengawasan dan kekuasaan seorang wali, namun tidak dapat menggunakannya selain untuk kepentingan anak tersebut, dan seorang wali bertanggung jawab atas segala kerugian harta si anak yang berada dalam kekuasaanya.
3. Akibat hukum terhadap perwalian anak karena pencabutan kekuasaan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya (Studi Putusan Pengadilan Agama NO.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn) yaitu wali yang ditunjuk dan diputuskan oleh Pengadilan Agama menggantikan kedudukan orang tua atas kekuasaan terhadap anaknya yang telah dicabut oleh Pengadilan Agama karena tidak diketahui keberadaannya, dan wali tersebut berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, dan masa perwalian tersebut berlangsung sampai anak tersebut beranjak dewasa atau sudah kawin serta sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan orang tua kandung dari si anak yang dicabut kekuasaan asuh terhadap anaknya tidak bisa lagi memperoleh hak asuhnya kembali karena ia telah melalikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dan itu adalah suatu merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan Unadang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah bertindak tegas dalam memberikan sanksi kepada orang tua yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya, apalagi sampai anak tersebut ditinggalkan dan diabaikan serta ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya, Agar kasus seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi.
2. Diharapkan Pemerintah membentuk badan hukum atau menunjuk badan hukum, dalam hal ini yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memantau perkembangan serta kelangsungan kehidupan dari anak yang berada dibawah perwalian secara terus menerus, untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh walinya dan/atau walinya melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak yang dibawah perwaliannya tersebut.
3. Diharapkan anak yang berada dibawah perwalian harus diperhatikan perkembangan psikologisnya, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik agar ketika dewasa dan ketika sudah berkeluarga, anak tersebut menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya dan tidak menelantarkan anaknya.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman dan Syahrani, Riduan, *Hukum Perkawinan*, Bandung, Penerbit: Alumni, 1978.
- Al-barry, Zakarya Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta, Penerbit: Bulan Bintang, 1977.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. cet. ke-5, Yogyakarta, penerbit: Pustaka Pelajar. 2004
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktisi II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para ulama*, Bandung, Penerbit: Karisma, 2008.
- Darmabrata, Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet,2, Jakarta,Penerbit: Fakultas Hukum Indonesia, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia (menurut: perundangan hukum adat hukum Islam)*, Bandung, Penerbit: Mandar Maju, 2003.

- Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Penerbit: PT Raja Grafindo, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit: Prenada Media, 2009.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Penerbit: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Cet 34*, Bandung, Penerbit: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Penerbit: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. Ke-17*, Jakarta, Penerbit: Intermasa, 1983.
- Sing, Ko Tjay, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Semarang, Penerbit: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Penerbit: Ghalia Indonesia, 1998.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Penerbit: Rajawali Press, 2004.
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit: Rineka Cipta, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .

C. Karya Ilmiah dan Lain-lain

- Makalah Ilmiah oleh Ikatan Pendidikan Luar Sekolah Se-Indonesia, Pemahaman *Hak Asuh Anak dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak Di Pengadilan*, Arsip PLSUM, 2016.